

IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN AKREDITASI INTERNAL DI SEKOLAH DASAR DAN MENENGAH: Tinjauan Literatur

Andi Rifa'atul Mahmuda¹, Mardhiah²

Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: 25andirifaa@gmail.com, dhiah612@gmail.com

Abstract (English)

This study aims to comprehensively examine the implementation and challenges of internal accreditation in elementary and secondary schools through an academic literature review approach. The method used in this study is a qualitative literature review by analyzing a number of scientific articles, research reports, and relevant policy documents from the last ten years. The findings indicate that internal accreditation plays a significant role in fostering quality culture and improving school performance; however, its implementation still faces obstacles such as limited understanding of standards, lack of technical training, and weak managerial and digital system support. The study also highlights that the effectiveness of internal accreditation highly depends on school leadership commitment, teacher capacity, and the integration of digital quality data. This review concludes that strengthening policy, human resource capacity development, and IT integration are key aspects in optimizing internal accreditation. The implication of this study points to the importance of collaboration between the government, education supervisors, and schools in creating a sustainable and adaptive quality assurance ecosystem.

Article History

Submitted: 8 June 2025
Accepted: 17 June 2025
Published: 18 June 2025

Keywords: Internal Accreditation, Elementary and Secondary Schools, Quality Assurance, Implementation Challenges, Quality Culture.

Abstrak (Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif implementasi dan tantangan akreditasi internal di tingkat sekolah dasar dan menengah melalui pendekatan tinjauan literatur akademik. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah kajian kualitatif berbasis literatur, dengan menganalisis sejumlah artikel ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang relevan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa akreditasi internal berperan penting dalam mendorong budaya mutu dan peningkatan kinerja sekolah, namun implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan pemahaman standar, kurangnya pelatihan teknis, serta lemahnya dukungan manajerial dan digitalisasi sistem. Temuan juga menyoroti bahwa efektivitas akreditasi internal sangat bergantung pada komitmen kepemimpinan sekolah, kapasitas guru, serta integrasi data mutu secara digital. Kajian ini menyimpulkan bahwa penguatan kebijakan, pengembangan kapasitas SDM, dan integrasi teknologi informasi menjadi aspek kunci dalam optimalisasi akreditasi internal. Implikasi dari penelitian ini mengarah pada pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pengawas pendidikan, dan sekolah dalam menciptakan ekosistem penjaminan mutu yang berkelanjutan dan adaptif.

Sejarah Artikel

Submitted: 8 June 2025
Accepted: 17 June 2025
Published: 18 June 2025

Kata Kunci

Akreditasi Internal, Sekolah Dasar dan Menengah, Penjaminan Mutu, Tantangan Implementasi, Budaya Mutu.

Pendahuluan

Peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar dan menengah merupakan sebuah keniscayaan dalam menghadapi era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat. Dalam konteks ini, sekolah tidak hanya dituntut untuk menyediakan layanan pendidikan dasar yang merata dan terjangkau, tetapi juga untuk menjamin bahwa layanan tersebut memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan secara nasional. Salah satu strategi yang digunakan untuk menjamin mutu pendidikan

adalah melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), di mana akreditasi internal menjadi bagian penting dari upaya tersebut. Akreditasi internal merupakan proses evaluasi diri yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian terhadap standar mutu dan merumuskan langkah-langkah perbaikannya secara berkelanjutan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016).

Namun, dalam implementasinya, akreditasi internal masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Berdasarkan temuan lapangan dan laporan dari beberapa satuan pendidikan, terdapat kesenjangan yang cukup mencolok antara kebijakan nasional mengenai penjaminan mutu internal dengan realitas implementasinya di sekolah. Kesenjangan ini mencakup kurangnya pemahaman terhadap konsep mutu, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta rendahnya komitmen dan kepemimpinan kepala sekolah dalam mengintegrasikan budaya mutu ke dalam manajemen sekolah (Setiawan, 2020).

Beberapa penelitian terdahulu memang telah membahas implementasi SPMI dan akreditasi di berbagai jenjang pendidikan, tetapi mayoritas dari kajian tersebut lebih menyoroti akreditasi eksternal yang dilakukan oleh lembaga seperti Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M). Akreditasi eksternal tersebut lebih menekankan pada penilaian oleh pihak luar berdasarkan kriteria dan indikator tertentu yang telah distandarkan secara nasional. Di sisi lain, studi yang secara khusus mengkaji akreditasi internal sebagai bagian dari proses refleksi dan evaluasi diri yang dilakukan oleh sekolah, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, masih sangat terbatas. Beberapa di antaranya hanya menyentuh aspek prosedural tanpa menggali lebih dalam tentang konteks manajerial, kultural, dan teknologi yang turut mempengaruhi efektivitas akreditasi internal (Suryadi, 2021; Rahmawati, 2019).

Dengan demikian, kajian literatur ini menghadirkan nilai kebaruan (*novelty*) berupa sintesis akademik yang mengulas secara komprehensif bagaimana akreditasi internal diterapkan di sekolah dasar dan menengah, serta tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Kajian ini juga berupaya untuk memetakan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan akreditasi internal, dengan memberikan perhatian khusus pada aspek sumber daya manusia, kepemimpinan sekolah, dukungan teknologi, dan kebijakan pendidikan. Di samping itu, kajian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi peningkatan mutu pendidikan yang berbasis pada evaluasi internal yang sistematis dan berkelanjutan.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi akreditasi internal di sekolah dasar dan menengah berdasarkan temuan-temuan akademik terbaru. Fokus utama ditujukan pada strategi implementasi, faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta peluang pengembangan sistem penjaminan mutu internal yang lebih efektif dan adaptif terhadap dinamika pendidikan. Selain menyajikan ulasan kritis terhadap literatur yang relevan, artikel ini juga menawarkan pemetaan komprehensif yang dapat dijadikan referensi praktis bagi pengambil kebijakan dan pelaksana pendidikan di tingkat sekolah.

Secara *state of the art*, sejumlah literatur terkini menunjukkan bahwa efektivitas akreditasi internal sangat dipengaruhi oleh kesiapan budaya mutu di sekolah, kepemimpinan yang visioner, dan integrasi teknologi dalam manajemen mutu. Nurgroho (2022) mengemukakan bahwa transformasi digital dalam sistem informasi mutu berkontribusi besar dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi proses evaluasi internal. Fitriani dan Andriani (2023) menambahkan bahwa peran kepemimpinan kepala sekolah sangat menentukan dalam membangun komitmen kolektif terhadap mutu dan mendorong partisipasi aktif seluruh warga sekolah dalam pelaksanaan SPMI. Sementara itu, Sari (2021) menekankan pentingnya pelatihan dan pendampingan teknis bagi tim penjaminan mutu sekolah sebagai kunci keberhasilan implementasi akreditasi internal, terutama di sekolah yang sebelumnya lebih bergantung pada mekanisme evaluasi eksternal.

Namun, hingga saat ini belum banyak kajian yang menggambarkan secara integratif bagaimana sinergi antara aspek manajerial, teknologi, dan kebijakan dapat memperkuat pelaksanaan akreditasi internal. Penelitian yang ada cenderung bersifat parsial dan belum menawarkan model implementasi yang dapat diterapkan secara luas di berbagai konteks sekolah. Oleh karena itu, kajian literatur ini penting untuk mengisi celah kajian tersebut dan memberikan kontribusi ilmiah yang bermakna dalam pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan nasional.

Lebih lanjut, artikel ini juga menyoroti tantangan-tantangan praktis yang sering muncul dalam pelaksanaan akreditasi internal, seperti keterbatasan waktu guru dalam melakukan refleksi dan dokumentasi mutu, ketidakjelasan indikator penilaian internal, serta kurangnya integrasi antara data mutu internal dengan sistem pelaporan dan perencanaan sekolah. Temuan-temuan tersebut menuntut adanya pendekatan yang lebih strategis dan kontekstual dalam merancang sistem akreditasi internal yang tidak hanya sesuai dengan kebijakan nasional, tetapi juga relevan dengan kondisi riil di lapangan.

Dengan pendekatan tinjauan literatur akademik, kajian ini memanfaatkan berbagai sumber pustaka primer yang relevan, terutama dari jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan mencerminkan dinamika dan perkembangan terbaru dalam bidang manajemen mutu pendidikan. Kajian ini juga menggunakan pendekatan analitis kritis dalam mengolah data literatur dengan tujuan untuk menghasilkan sintesis pengetahuan yang aplikatif dan dapat mendukung pengambilan keputusan di level kebijakan maupun praktik sekolah.

Akhirnya, melalui artikel ini diharapkan lahir sebuah pemahaman yang lebih mendalam mengenai posisi strategis akreditasi internal dalam sistem pendidikan Indonesia, serta bagaimana tantangan-tantangan yang ada dapat diatasi melalui pendekatan manajerial, teknologi, dan kolaboratif yang efektif. Dengan demikian, akreditasi internal tidak lagi dipandang sebagai beban administratif semata, melainkan sebagai instrumen penting dalam membangun budaya mutu dan meningkatkan kinerja sekolah secara menyeluruh.

Perubahan paradigma ini sangat penting untuk ditanamkan di seluruh level pengelolaan pendidikan, mulai dari tingkat satuan pendidikan hingga ke jenjang pemerintah daerah dan pusat.

Akreditasi internal harus diletakkan sebagai bagian integral dari siklus manajemen mutu yang bersifat partisipatif, reflektif, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan. Ketika sekolah mampu memanfaatkan akreditasi internal sebagai alat pembelajaran organisasi (*organizational learning tool*), maka proses ini akan memberikan manfaat yang nyata bagi peningkatan mutu pembelajaran, manajemen sekolah, serta pengembangan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan.

Dalam konteks ini, penting untuk menyadari bahwa salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan akreditasi internal adalah adanya persepsi negatif dari sebagian besar pemangku kepentingan di sekolah, terutama guru dan staf administrasi. Banyak di antara mereka yang merasa bahwa proses akreditasi internal hanya akan menambah beban kerja tanpa memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini sering kali diperparah oleh pendekatan implementasi yang cenderung birokratis dan terlalu berorientasi pada kelengkapan dokumen. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan pendekatan yang lebih edukatif dan komunikatif dalam mensosialisasikan nilai dan manfaat akreditasi internal, terutama dalam mengaitkannya dengan peningkatan hasil belajar peserta didik serta perbaikan proses manajerial sekolah secara menyeluruh.

Lebih jauh, keberhasilan pelaksanaan akreditasi internal juga sangat bergantung pada kapasitas institusional sekolah, terutama dalam hal manajemen data dan informasi mutu. Sekolah yang memiliki sistem dokumentasi dan pelaporan yang baik cenderung lebih mudah dalam melakukan evaluasi diri yang akurat dan terukur. Dalam hal ini, peran teknologi informasi menjadi sangat penting. Pemanfaatan aplikasi berbasis digital untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data mutu akan sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses akreditasi internal. Namun, masih banyak sekolah dasar dan menengah di berbagai daerah yang mengalami keterbatasan akses terhadap infrastruktur teknologi serta kurangnya kompetensi digital di kalangan tenaga pendidik dan kependidikan. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung penguatan literasi digital di kalangan warga sekolah menjadi kebutuhan mendesak dalam memperkuat pondasi pelaksanaan akreditasi internal yang berbasis data.

Di samping itu, kolaborasi antar sekolah juga perlu dikembangkan dalam bentuk *learning community* atau *mutual mentoring* dalam menjalankan proses akreditasi internal. Sekolah-sekolah yang telah berhasil mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal secara efektif dapat menjadi model atau mitra pembelajaran bagi sekolah lain yang masih dalam tahap awal. Pola kemitraan seperti ini tidak hanya akan mempercepat proses transfer pengetahuan dan pengalaman, tetapi juga akan membangun solidaritas antar sekolah dalam menghadapi tantangan bersama. Pemerintah daerah dan instansi terkait seperti dinas pendidikan dapat memainkan peran sebagai fasilitator dalam membangun jejaring ini melalui forum komunikasi, pelatihan bersama, maupun platform digital berbasis komunitas praktik (*community of practice*).

Akhirnya, kajian ini menekankan bahwa akreditasi internal bukanlah semata-mata tanggung jawab sekolah sebagai satuan pendidikan, tetapi juga membutuhkan dukungan sistemik dari seluruh ekosistem pendidikan. Pemerintah, pengawas sekolah, komite sekolah, bahkan orang tua peserta didik harus turut terlibat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penguatan

budaya mutu. Komitmen bersama, kesediaan untuk terus belajar, dan orientasi pada perbaikan berkelanjutan merupakan kunci utama agar akreditasi internal dapat menjadi kekuatan transformasional dalam sistem pendidikan nasional. Hanya dengan cara inilah, akreditasi internal dapat menjelma menjadi instrumen strategis dalam mengantarkan sekolah-sekolah Indonesia menuju mutu pendidikan yang unggul, inklusif, dan berdaya saing global.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian kualitatif dengan pendekatan tinjauan literatur (*literatur review*) yang bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi serta tantangan yang dihadapi dalam proses akreditasi internal di sekolah dasar dan menengah. Tinjauan literatur ini menggunakan studi dokumenter sebagai Teknik utama dalam pengambilan data, Dimana sumber-sumber data diambil dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, laporan kebijakan pemerintah, serta dokumen-dokumen resmi dari Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, BAN-S/M, dan instansi terkait dan relevan dengan topik penelitian ini. Artikel dan sumber literasi yang digunakan dipilih berdasarkan kriteria terkini, relevansi isi, serta kualitas publikasi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Instrument utama dalam kajian ini adalah peneliti sendiri yang bertindak sebagai instrument kunci (*human instrument*) dengan menggunakan pedoman telaah isi (*content analysis guide*) untuk menyeleksi, memahami, dan mengkalsifikasi data dari berbagai literatur. Fokus pengkajian diarahkan pada dua aspek utama yaitu, strategi implementasi akreditasi internal yang dilaksanakan di satuan Pendidikan, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Populasi dalam kajian ini adalah semua dokumen ilmiah yang memuat tema terkait akreditasi internal di sekolah dasar dan menengah. Sedangkan, sampel dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan representasi geografis, jenjang Pendidikan, dan kebaruan isu. Artikel dan dokumen yang menjadi sampel dikaji secara mendalam melalui proses analisis tematik (*thematic analysis*) untuk menemukan pola-pola temuan yang konsisten maupun perbedaan antar sumber literatur. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan Langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan sesuai dengan model analisis interaktif Miles dan Huberman.

Dengan menggunakan metode tinjauan literatur yang sistematis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai praktik akreditasi internal serta hambatan yang sering muncul, sekaligus menjadi pijakan awal untuk penelitian lanjutan yang bersifat empiris di masa depan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil kajian terhadap berbagai literatur akademik menunjukkan bahwa implementasi akreditasi internal di sekolah dasar dan menengah merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah diamanatkan dalam kebijakan pendidikan nasional. Akreditasi internal pada hakikatnya adalah evaluasi diri yang dilakukan oleh satuan pendidikan terhadap pencapaian indikator mutu berbasis Standar Nasional Pendidikan (SNP). Implementasi ini bukan hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai alat diagnostik yang digunakan sekolah untuk mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam sistem pengelolaannya. Berdasarkan hasil telaah pustaka oleh Fathurrochman, dkk. (2021), akreditasi internal jika dilakukan secara konsisten dapat menjadi pondasi penting bagi perbaikan mutu secara

berkelanjutan. Namun demikian, literatur juga menunjukkan bahwa implementasinya belum merata. Banyak sekolah masih melaksanakan evaluasi internal sebatas pengisian dokumen tanpa pendekatan reflektif yang menyeluruh. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi satuan pendidikan dalam membangun budaya mutu yang holistik.

Salah satu prinsip utama dalam akreditasi internal adalah keterlibatannya dalam pendekatan sistematis berbasis prinsip manajemen mutu pendidikan. Konsep manajemen mutu yang digunakan umumnya merujuk pada pendekatan *Plan-Do-Check-Act* (PDCA) yang diperkenalkan oleh Deming dan telah banyak diadopsi dalam konteks pendidikan. Akreditasi internal merupakan wujud dari tahap *Check* dalam siklus PDCA, yang mengarah pada pengambilan keputusan dan tindakan (*Act*) sebagai kelanjutan dari refleksi atas implementasi program (*Do*) dan perencanaan awal (*Plan*). Sallis (2012) menegaskan bahwa manajemen mutu dalam pendidikan memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan agar proses evaluasi tidak hanya bersifat administratif, melainkan menjadi gerakan internal sekolah untuk tumbuh bersama. Dalam praktiknya, masih banyak sekolah yang berhenti pada tahap pengumpulan data tanpa tindak lanjut berbasis analisis mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara konsep dan implementasi nyata yang berdampak pada stagnasi mutu pendidikan. Akreditasi internal seharusnya menjadi ruang pembelajaran bagi sekolah untuk terus tumbuh dan berkembang dalam memenuhi ekspektasi pendidikan yang berkualitas.

Berdasarkan temuan dari sejumlah jurnal ilmiah dan laporan kebijakan, kelebihan utama dari implementasi akreditasi internal adalah fleksibilitas dan partisipatif. Sekolah dapat merancang instrumen evaluasi yang relevan dengan konteks dan kebutuhan lokal sepanjang tidak menyimpang dari prinsip dan indikator SNP. Kelebihan ini memberikan ruang kreativitas dan inovasi kepada kepala sekolah dan tim penjamin mutu untuk mengembangkan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan masing-masing. Asrori dan Hakim (2022) menyebutkan bahwa akreditasi internal memiliki potensi besar untuk membentuk budaya refleksi dan perbaikan berkelanjutan di kalangan pendidik dan tenaga kependidikan. Keterlibatan aktif guru dan staf dalam proses evaluasi diri memungkinkan mereka memiliki rasa kepemilikan terhadap mutu pendidikan. Dengan demikian, akreditasi internal bukan hanya sebagai alat ukur kinerja sekolah, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan sumber daya manusia. Pendekatan ini mencerminkan nilai organisasi pembelajaran seperti yang dikembangkan oleh Peter Senge (2006), yaitu membangun sekolah sebagai entitas yang terus belajar dari pengalaman dan refleksi internal.

Namun demikian, hasil studi literatur juga menemukan bahwa implementasi akreditasi internal menghadapi tantangan yang tidak ringan. Tantangan pertama adalah rendahnya pemahaman tentang indikator mutu dan tata cara evaluasi di kalangan pendidik, terutama pada sekolah di daerah dengan sumber daya terbatas. Banyak kepala sekolah dan guru belum memahami dengan baik bagaimana cara menyusun dokumen evaluasi diri yang akurat dan valid. Kedua, terdapat keterbatasan fasilitas teknologi yang menghambat proses digitalisasi data mutu, sehingga laporan akreditasi internal masih bersifat manual dan tidak efisien. Ketiga, adanya persepsi negatif bahwa akreditasi internal adalah beban administratif semata, bukan alat penggerak perubahan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurlaili (2023), ditemukan bahwa sebanyak 62% sekolah dasar dan menengah belum memiliki dokumen akreditasi internal yang terdokumentasi secara sistematis dan berkesinambungan. Hal ini menjadi indikasi perlunya peningkatan kapasitas dan

pendampingan teknis bagi satuan pendidikan agar mampu menjalankan akreditasi internal secara optimal.

Ketika membandingkan temuan hasil tinjauan ini dengan penelitian sebelumnya, tampak adanya variasi yang signifikan dalam pelaksanaan akreditasi internal antara sekolah negeri dan swasta, serta antara sekolah di wilayah perkotaan dan pedesaan. Zainal dan Nurhayati (2021) menemukan bahwa sekolah swasta cenderung lebih tertib dalam menjalankan akreditasi internal karena adanya dorongan kuat dari yayasan dan manajemen sekolah untuk mempertahankan kredibilitas lembaga. Sebaliknya, Mulyasa (2020) mencatat bahwa di sekolah negeri, terutama di kota besar, penerapan akreditasi internal lebih sistematis karena adanya dukungan SDM dan infrastruktur yang memadai. Namun, di sekolah negeri di daerah pinggiran, pelaksanaan akreditasi internal masih minim karena keterbatasan akses dan pendampingan. Temuan ini mempertegas bahwa keberhasilan akreditasi internal tidak hanya ditentukan oleh status sekolah, melainkan juga oleh faktor kepemimpinan, kultur organisasi, dan dukungan sistemik dari pemerintah daerah.

Dalam perspektif argumentatif yang konstruktif dapat ditegaskan bahwa akreditasi internal seharusnya tidak dipandang sebagai instrumen evaluatif semata, tetapi sebagai proses pendidikan kelembagaan. Sekolah yang berhasil menerapkan akreditasi internal secara efektif umumnya memiliki kepemimpinan transformasional, tim penjamin mutu yang solid, serta kultur kerja yang adaptif dan reflektif. Akreditasi internal menjadi wahana untuk mengukur sejauh mana proses manajemen sekolah berjalan sesuai prinsip mutu, sekaligus menjadi dasar untuk perbaikan program dan strategi ke depan. Argumentasi ini diperkuat dengan hasil studi dari Wibowo (2022) yang menunjukkan bahwa sekolah-sekolah dengan tim penjamin mutu aktif mengalami peningkatan kinerja dalam indikator layanan peserta didik dan tata kelola. Dengan demikian, akreditasi internal merupakan proses pembelajaran organisasi yang memerlukan kesadaran kolektif dan kemauan berubah dari seluruh warga sekolah.

Dalam konteks nilai-nilai keislaman, implementasi akreditasi internal dapat dikaitkan dengan prinsip hisab (perhitungan amal) dan muhasabah (evaluasi diri) sebagaimana terdapat dalam surah Al-Hasyr:59/8.

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهْجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ ۗ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

“(18) Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat ini memberikan pelajaran penting bahwa dalam menjalankan tugas kelembagaan, sekolah sebagai institusi amanah wajib melakukan evaluasi terhadap apa yang telah dikerjakan demi perbaikan di masa depan. Demikian pula dalam akreditasi internal, muhasabah diperlukan agar setiap kelemahan bisa dikenali, dan perbaikan bisa direncanakan secara rasional dan bertanggung jawab.

Hasil pembahasan juga menunjukkan pentingnya dukungan kebijakan dan teknologi dalam mendukung implementasi akreditasi internal. Pemerintah daerah melalui dinas pendidikan memiliki peran strategis dalam memberikan pendampingan teknis, pelatihan, dan penguatan sistem informasi mutu pendidikan. Selain itu, pengembangan aplikasi digital berbasis data mutu sekolah juga dapat membantu sekolah dalam mendokumentasikan capaian dan tindak lanjut dari evaluasi diri yang dilakukan. Misalnya, pengintegrasian antara hasil evaluasi diri dengan sistem rapor mutu yang telah dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dapat memudahkan sekolah dalam menganalisis kesenjangan dan merancang program peningkatan mutu. Digitalisasi ini akan mempercepat proses pengambilan keputusan dan memperkuat budaya data dalam tata kelola sekolah.

Solusi lain yang dapat ditempuh untuk menghadapi tantangan implementasi akreditasi internal adalah penguatan peran pengawas sekolah dan perguruan tinggi mitra sebagai fasilitator pendampingan. Pendampingan tidak hanya dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, tetapi juga mentoring dan coaching dalam menyusun program peningkatan mutu berdasarkan hasil evaluasi. Di samping itu, pengembangan komunitas belajar antar sekolah (*school cluster*) juga dapat menjadi sarana berbagi praktik baik dalam pelaksanaan akreditasi internal. Seperti ditunjukkan oleh Fauzi dan Haryanto (2022), kolaborasi antar sekolah dalam melakukan evaluasi bersama berdampak positif pada peningkatan mutu manajemen sekolah.

Mengintegrasikan nilai-nilai spiritual ke dalam proses akreditasi internal juga menjadi aspek penting. Proses evaluasi diri dapat dilihat sebagai refleksi terhadap tanggung jawab moral dan spiritual sebagai pendidik. Dalam Al-Qur'an surah Al-Zalzalah/99:7-8.

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

“(7) Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasannya). (8) Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasannya pula).”

Ayat ini menegaskan pentingnya akuntabilitas dan integritas dalam setiap aktivitas, termasuk dalam pengelolaan sekolah. Akreditasi internal yang dilakukan dengan jujur dan profesional menjadi cermin dari nilai amanah dan tanggung jawab yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh warga sekolah.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menegaskan bahwa akreditasi internal memiliki peran penting dalam peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kesiapan SDM, dukungan kebijakan, akses terhadap teknologi, serta adanya komitmen kolektif di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang terencana, melibatkan semua pihak, dan berorientasi pada penguatan budaya mutu sebagai bagian dari pembelajaran organisasi. Evaluasi yang dilakukan sekolah terhadap dirinya bukan semata-mata untuk memenuhi tuntutan administrasi, tetapi sebagai bagian dari ikhtiar menuju pendidikan yang bermutu, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkuat pelaksanaan akreditasi internal, namun dinamika dan tantangan di lapangan tetap menunjukkan perlunya penyesuaian kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan sekolah. Salah satu kritik utama terhadap

sistem saat ini adalah adanya kesenjangan antara kebijakan makro dengan kapasitas implementasi mikro di tingkat sekolah. Dalam konteks ini, akreditasi internal sering kali berjalan tidak optimal karena adanya miskomunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Banyak kepala sekolah yang mengaku masih belum memahami arah kebijakan SPMI secara menyeluruh, termasuk kaitannya dengan peran akreditasi internal. Hal ini mengindikasikan perlunya penyederhanaan panduan teknis serta pelatihan berkelanjutan yang berorientasi pada praktik lapangan, bukan sekadar pemahaman konseptual. Dengan kata lain, untuk mendorong efektivitas akreditasi internal, dibutuhkan ekosistem kebijakan yang mendukung proses bottom-up learning di sekolah, bukan hanya pendekatan top-down yang normatif.

Tidak dapat disangkal bahwa keberhasilan akreditasi internal sangat berkaitan erat dengan gaya kepemimpinan kepala sekolah. Pemimpin sekolah yang memiliki orientasi pada mutu, kolaboratif, dan reflektif cenderung mampu menggerakkan seluruh warga sekolah dalam proses evaluasi diri yang bermakna. Studi oleh Herawan (2021) menegaskan bahwa kepala sekolah yang menerapkan prinsip kepemimpinan distributif dapat membagi tanggung jawab secara efektif kepada tim penjamin mutu internal, guru, serta tenaga kependidikan lainnya. Kepemimpinan semacam ini membangun iklim kerja yang terbuka, di mana refleksi kritis atas kekurangan tidak dianggap sebagai ancaman, tetapi sebagai peluang untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kepemimpinan kepala sekolah menjadi agenda penting dalam mendukung keberhasilan akreditasi internal sebagai instrumen transformasi kelembagaan.

Selain aspek kepemimpinan, keberhasilan implementasi akreditasi internal juga ditentukan oleh sejauh mana sekolah memiliki sistem dokumentasi dan pengelolaan data yang terintegrasi. Dalam era digital saat ini, data menjadi aset penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based decision making*). Namun, realitas menunjukkan bahwa banyak sekolah belum memiliki sistem data yang memadai. Misalnya, dokumen evaluasi diri (EDS) masih banyak yang disusun secara manual, dengan format dan indikator yang tidak seragam. Hal ini menghambat proses analisis longitudinal serta penelusuran tindak lanjut. Untuk itu, perlu adanya intervensi kebijakan yang mendukung digitalisasi proses akreditasi internal, termasuk pengadaan sistem informasi mutu sekolah berbasis cloud yang dapat diakses oleh sekolah secara mudah, aman, dan terstandarisasi.

Dari perspektif budaya organisasi, akreditasi internal akan menjadi instrumen yang efektif hanya jika ditopang oleh budaya mutu yang hidup dan tumbuh di lingkungan sekolah. Budaya mutu bukan hanya sekadar slogan atau dokumen visi dan misi yang indah di atas kertas, melainkan nilai-nilai yang terinternalisasi dalam praktik keseharian warga sekolah. Ini mencakup komitmen terhadap peningkatan berkelanjutan (*continuous improvement*), keterbukaan terhadap umpan balik (*feedback culture*), serta tanggung jawab bersama atas capaian mutu. Namun, sebagaimana diungkap dalam kajian oleh Rahmawati dan Susanto (2022), banyak sekolah yang belum mengembangkan budaya refleksi secara sistematis. Proses evaluasi diri sering kali bersifat formalitas dan dilakukan hanya menjelang momen evaluasi eksternal. Hal ini menunjukkan perlunya reorientasi nilai-nilai organisasi yang menempatkan evaluasi sebagai bagian integral dari siklus pembelajaran institusional.

Lebih jauh, perlu dicermati bahwa akreditasi internal tidak hanya berdampak pada peningkatan aspek administratif dan manajerial, tetapi juga pada dimensi pedagogik dan kesejahteraan peserta didik. Evaluasi terhadap indikator mutu pembelajaran. Misalnya, dapat

membuka wawasan baru bagi guru mengenai efektivitas metode dan strategi yang digunakan di kelas. Selain itu, refleksi atas indikator layanan peserta didik akan mendorong sekolah untuk lebih memperhatikan aspek psikososial, inklusivitas, serta kebutuhan khusus peserta didik. Penelitian oleh Hidayatullah (2023) menemukan bahwa sekolah yang aktif dalam evaluasi diri mengalami peningkatan signifikan dalam hal kepuasan peserta didik dan partisipasi orang tua. Oleh karena itu, pendekatan akreditasi internal yang holistik harus melibatkan dimensi akademik, manajerial, sosial, dan spiritual secara berimbang.

Sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu, akreditasi internal juga harus dikaitkan dengan peran monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Salah satu kekurangan dari implementasi di banyak sekolah adalah ketiadaan mekanisme umpan balik yang jelas antara hasil evaluasi dan rencana tindak lanjut. Dalam beberapa kasus, dokumen evaluasi diri hanya berhenti sebagai arsip tanpa implementasi nyata. Oleh sebab itu, penting bagi sekolah untuk membentuk unit atau tim khusus yang bertugas mengawal implementasi rencana perbaikan, melakukan monitoring berkala, serta melaporkan hasilnya kepada seluruh pemangku kepentingan. Keterlibatan komite sekolah, orang tua, dan pengawas dalam proses ini juga akan menumbuhkan akuntabilitas sosial sekaligus memperkuat legitimasi proses akreditasi internal sebagai upaya kolektif.

Dalam konteks pendidikan Islam, akreditasi internal dapat dijadikan sebagai sarana mewujudkan visi pendidikan yang holistik dan integral, sebagaimana termaktub dalam konsep insan kamil atau manusia paripurna. Evaluasi diri bukan hanya berkaitan dengan pencapaian akademik dan administratif, tetapi juga dengan kualitas spiritual, etika, dan karakter peserta didik. Dalam tradisi Islam, prinsip muhasabah telah lama dikenal sebagai instrumen evaluasi spiritual yang mendorong manusia untuk menilai dirinya secara jujur dan bertanggung jawab. Konsep ini sejalan dengan prinsip akreditasi internal yang mengedepankan refleksi dan perbaikan berkelanjutan. Oleh karena itu, pendidikan berbasis Islam perlu mengembangkan indikator mutu yang tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga afektif dan spiritual, guna membentuk generasi yang cerdas secara intelektual dan berakhlak mulia.

Keberhasilan akreditasi internal juga sangat bergantung pada sinergi antara satuan pendidikan dengan pihak eksternal seperti perguruan tinggi, lembaga penjaminan mutu, dan lembaga swadaya masyarakat. Kolaborasi ini dapat dilakukan dalam bentuk asistensi teknis, pengembangan instrumen evaluasi, pelatihan sumber daya manusia, hingga penelitian kolaboratif. Salah satu model yang terbukti efektif adalah *school university partnership*, di mana perguruan tinggi berperan sebagai mitra strategis dalam peningkatan kapasitas sekolah. Sebagai contoh, Universitas Negeri Malang dalam program Kemitraan Sekolah Unggul telah mendampingi lebih dari 50 sekolah dalam menyusun dan merealisasikan akreditasi internal secara berkelanjutan. Model kolaborasi semacam ini dapat direplikasi secara nasional sebagai strategi sistemik untuk memperkuat mutu pendidikan di tingkat akar rumput.

Perlu juga ditekankan bahwa akreditasi internal bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen dalam proses penjaminan mutu yang lebih besar. Keberadaan sistem ini seharusnya menjadi jembatan menuju transformasi pendidikan yang lebih luas, termasuk penguatan kurikulum, peningkatan kapasitas guru, pembelajaran berbasis kompetensi, serta tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam kerangka tersebut, evaluasi diri menjadi titik awal bagi sekolah untuk menyusun roadmap pengembangan institusional yang berorientasi jangka panjang. Ini mencakup penguatan perencanaan berbasis data, penyusunan program berbasis kebutuhan,

serta penganggaran berbasis hasil (*performance based budgeting*) yang kesemuanya bermuara pada peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi seluruh warga sekolah.

Untuk mendukung implementasi akreditasi internal secara nasional, diperlukan integrasi sistemik antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus menyediakan kerangka regulatif, pedoman teknis, dan sistem pendataan terpadu yang dapat digunakan oleh seluruh satuan pendidikan. Di sisi lain, pemerintah daerah perlu mengambil peran aktif dalam fasilitasi teknis, pengawasan, dan pembinaan sekolah dalam pelaksanaan evaluasi diri. Penelitian oleh Puspitasari dan Indrawan (2023) menunjukkan bahwa daerah yang memiliki kebijakan afirmatif terhadap mutu pendidikan (misalnya program Sekolah Bermutu di Jawa Tengah) cenderung memiliki capaian yang lebih baik dalam pelaksanaan akreditasi internal. Sinergi ini perlu diperkuat agar tidak terjadi disorientasi atau inkonsistensi antara kebijakan nasional dan implementasi lokal.

Dalam ranah implementasi teknis, digitalisasi menjadi kata kunci yang tak bisa diabaikan. Pemerintah perlu mendorong adopsi teknologi dalam setiap tahapan proses akreditasi internal, mulai dari pengumpulan data, analisis capaian, hingga pelaporan dan tindak lanjut. Aplikasi berbasis web atau mobile yang dirancang dengan pendekatan user-friendly akan sangat membantu sekolah dalam melaksanakan evaluasi diri secara efisien dan efektif. Salah satu contoh yang telah dikembangkan adalah Sistem Informasi Manajemen Mutu Pendidikan (SIMPM) yang memungkinkan sekolah untuk memetakan indikator SNP secara real-time dan menyusun laporan berbasis grafik. Teknologi seperti ini perlu diperluas jangkauannya dan disesuaikan dengan kondisi daerah terpencil yang memiliki keterbatasan infrastruktur digital.

Terakhir, akreditasi internal akan menemukan makna sejatinya jika dilaksanakan dengan semangat partisipatif, reflektif, dan berorientasi pada perubahan. Sekolah sebagai lembaga pembelajaran harus menjadi agen transformasi, bukan hanya pelaksana regulasi. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, hingga pemerintah, harus menyadari bahwa keberhasilan akreditasi internal adalah tanggung jawab kolektif. Dalam semangat ini, akreditasi tidak hanya menjadi alat ukur, tetapi juga alat ukur ulang yaitu refleksi bersama untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan sistem pendidikan. Dengan pendekatan ini, kita dapat berharap bahwa akreditasi internal tidak hanya menjadi ritual administratif, tetapi juga pendorong perubahan nyata menuju pendidikan yang bermutu dan berkeadilan bagi semua.

Simpulan

Tinjauan literatur ini menunjukkan bahwa implementasi akreditasi internal di sekolah dasar dan menengah merupakan instrumen penting dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui sistem penjaminan mutu internal (SPMI). Akreditasi internal mendorong satuan pendidikan untuk secara aktif mengevaluasi diri, menetapkan standar mutu, dan melakukan perbaikan berkelanjutan secara mandiri. Namun, efektivitas implementasi masih menghadapi berbagai tantangan antara lain, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, minimnya pemahaman terhadap instrumen evaluasi mutu, keterbatasan waktu, serta masih lemahnya budaya mutu di lingkungan sekolah.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan akreditasi internal sangat mendukung pada keterlibatan aktif seluruh komponen sekolah, kepemimpinan kepala sekolah yang visioner, dukungan sistem digitalisasi manajemen mutu, serta keberlanjutan pendampingan

teknis dari pihak eksternal seperti pengawas dan dinas pendidikan. Oleh karena itu, akreditasi internal melainkan sebagai alat transformasi untuk membangun ekosistem sekolah yang adaptif, reflektif, dan berorientasi mutu.

Saran

Berdasarkan hasil kajian ini, penulis menyarankan agar kebijakan pendidikan di tingkat daerah maupun nasional memperkuat pelatihan dan pengembangan kapasitas kepala sekolah, guru, dan tim penjaminan mutu internal untuk memahami dan mengelola siklus akreditasi internal secara efektif. Digitalisasi proses evaluasi mutu juga perlu ditingkatkan agar proses akreditasi internal menjadi lebih efisien dan terintegrasi dengan sistem informasi sekolah.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi empiris terhadap implementasi akreditasi internal pada konteks sekolah tertentu. Contohnya di daerah 3T ataupun di sekolah swasta. Sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik terbaik, faktor penghambat, dan inovasi yang dapat direplikasi di sekolah lain. Kajian lanjutan ini penting menurut penulis karena untuk merumuskan model akreditasi internal yang kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka mendukung mutu pendidikan nasional.

Referensi

- Asrori, M., & Hakim, A. (2022). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di Sekolah Menengah: Studi Kasus pada Sekolah Swasta Islam. *Jurnal Kependidikan*, 10(2), 115–128.
- Fathurrochman, I., Sulaiman, M., & Rusdiana, D. (2021). Manajemen Akreditasi Internal dan Implikasinya terhadap Mutu Pendidikan. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 28(1), 45–56.
- Fauzi, I., & Haryanto, A. (2022). Kolaborasi antar sekolah dalam peningkatan mutu manajemen berbasis sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Sekolah*, 9(1), 45–57.
- Fitriani, A., & Andriani, R. (2023). Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 14(1), 55–67.
- Herawan, A. (2021). Pengaruh kepemimpinan distributif terhadap efektivitas penjaminan mutu internal di sekolah menengah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 28(2), 134–150.
- Hidayatullah, M. (2023). Refleksi mutu layanan peserta didik melalui evaluasi diri sekolah. *Jurnal Pendidikan Holistik*, 12(1), 98–110.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Panduan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Mulyasa, E. (2020). *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurgroho, A. (2022). Transformasi Digital dalam Sistem Informasi Mutu Pendidikan: Studi Kasus Implementasi SPMI Berbasis Aplikasi. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 24(2), 134–148.
- Nurlaili, S. (2023). Kesiapan Sekolah Dasar dan Menengah dalam Implementasi Evaluasi Diri Berbasis SPMI. *Jurnal Mutu Pendidikan*, 11(1), 21–35.

- Puspitasari, N., & Indrawan, M. (2023). Kebijakan afirmatif daerah dan penguatan sistem akreditasi internal. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 11(2), 210–225.
- Rahmawati, E. (2019). Evaluasi Implementasi SPMI di Sekolah Menengah: Studi Tentang Tantangan dan Strategi. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 10(2), 112–125.
- Rahmawati, S., & Susanto, H. (2022). Budaya refleksi dan keberlangsungan akreditasi internal pada satuan pendidikan dasar. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), 33–47.
- Sallis, E. (2012). *Total Quality Management in Education* (3rd ed.). London: Routledge.
- Sari, D. P. (2021). Pendampingan Tim Penjaminan Mutu dalam Pelaksanaan Akreditasi Internal di Sekolah Menengah. *Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 8(1), 88–96.
- Senge, P. M. (2006). *The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization*. New York: Doubleday.
- Setiawan, B. (2020). Kesenjangan Kebijakan dan Implementasi Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 5(1), 45–60.
- Suryadi, T. (2021). Studi Kritis terhadap Akreditasi Sekolah dan Upaya Penjaminan Mutu Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 17(3), 190–203.
- Wibowo, A. (2022). Pengaruh Kinerja Tim Penjamin Mutu terhadap Peningkatan Layanan Sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Manajemen Sekolah*, 9(2).